

Investor Bangun Baloi Kolam



KAWASAN Baloi Kolam masih ditempati rumah liar, Sabtu (5/5) lalu. BP Batam meminta pengembang yang akan mengelola lahan tersebut untuk segera membuat master plan pengembangan kawasan itu menjadi salah satu land mark kota Batam.

SK Pengelolaan Sudah Diterbitkan

RIFKY SETIAWAN LUBIS,
Batam Kota

BADAN Pengusahaan (BP) Batam telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang diperuntukkan bagi pengelola lahan di Baloi Kolam. SK tersebut menginstruksikan kepada pengelola lahan agar segera membuat masterplan pembangunan di atas lahan

tersebut.

Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto menyebut, ada 11 investor yang nantinya akan mengembangkan Baloi Kolam. "Mereka akan berembuk dulu untuk membahas masterplan sesuai dengan instruksi dari SK Kepala BP Batam tersebut," kata Eko, Kamis (10/5).

Ia mengatakan, investor su-

dah memiliki niat untuk segera membangun lahan tersebut. "Investor di sana juga sudah ingin membangun Baloi Kolam sebagai *land mark* Kota Batam," katanya lagi.

Baloi Kolam akan disulap menjadi Central Business District (CBD). Konsepnya terinspirasi dari kota-kota modern di luar negeri. CBD akan dipenuhi gedung-gedung yang

menjulung tinggi. "Diharapkan masyarakat Batam bisa bangga dengan pembangunan ini," ujarnya.

Sedangkan untuk SK relokasi warga Baloi Kolam, kata Eko, segera menyusul. "Setelah SK untuk pengelola, maka SK pemindahan warga akan diterbitkan," kata dia.

Instruksinya, kata dia, mengenai pemindahan warga yang bermukim di sana ke Kaveling Siap Bangun (KSB) yang sudah direncanakan. "Ada sejumlah

tempat, yang jelas tak di satu lokasi," paparnya.

BP merencanakan relokasi pada bulan ini. Jika tak tercapai, maka bisa dilanjutkan setelah Lebaran. "Yang terpenting ada kepastian warga segera dipindahkan ke lokasi KSB yang sudah disiapkan BP Batam," ungkapnya.

Sebelumnya, relokasi warga yang tinggal di Baloi Kolam rencananya akan dilakukan paling lambat hingga akhir 2018. Ada sekitar 4.500 ke-

pala keluarga yang akan dipindahkan dari kawasan tersebut.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Baloi Kolam yang letaknya di jantung kota itu akan dijadikan ikon Batam. "Kita punya niat Baloi Kolam akan dijadikan ikon Batam berbentuk bangunan apa saja. Maka warga saya di sana, diungsikan ke tempat baru," kata Rudi, beberapa waktu lalu.

Dari Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam, juga sudah sepakat kalau warga yang tinggal di Baloi Kolam mesti dipindahkan dalam waktu dekat ini.

Adapun daerah relokasi berada di beberapa tempat, seperti di Kecamatan Nongsa, Seibeduk, dan lainnya.

Selain kaveling, warga juga akan mendapat ganti rugi yakni uang sagu hati Rp 15 juta per rumah dari pihak pengembang.***

Kenalkan Daging Kerbau lewat Pasar Murah

Kualitas Bagus, Dijual di Bawah HET

BATAM KOTA (BP) - Bulog Batam bersama Tim Peman-tauan dan Pengendalian In-flasi Daerah (TPID), hari ini Jumat (10/5) menggelar op-erasi pasar sekaligus pasar

murah tahap satu. Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari di beberapa tempat seperti di Bengkong, Batuam-par, Sagulung, Lubukbaja, Batuaji, Seibeduk, Batam

Kota, Nongsa, dan Sekupang. Di Pasar murah ini, terdapat 21 komoditas barang yang dijual. Di antaranya beras,

■ Baca **KENALKAN..** Hal 13

akukan oknum pedagang emi keuntungan lebih besar menjelang dan selama Ramadhan nanti.

Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi saat meninjau pasar basah SP Plaza Saguhung dan Pasar Aviari di Batuaji, Rabu (9/5) lalu menuturkan langkah penertiban yakni dengan melakukan tera ulang alat ukur atau timbangan yang su-

ukur akan ketahanan jika beli ukur ulang di alat yang sudah kami sertakan itu," ujarnya. Saat ini, alat ukur yang disediakan Disperindag sudah tersebar di seluruh pasar, namun karena sudah lama dipakai tentu ada yang rusak atau lari meteran pengukurannya. Seperti yang dijumpai Zarefriadi pada alat ukur yang ada di Pasar Aviari. Alat ukur terse-

butan tera ulang alat ukur yang disediakan Disperindag. Zarefriadi juga meminta anggotanya untuk mengawasi alat ukur yang digunakan oleh masing-masing pedagang. Jika tidak sesuai dengan alat ukur yang disediakan Disperindag tentu akan tindak tegas. "Tadi saya sudah ngobrol dengan ibu-ibu yang belanja disini, memang ada masalah

belanjaannya dengan alat ukur

Biaya Sekolah Swasta Harus Turun

Sambungan dari hal 9

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019 ini. Dia berharap agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang kerap muncul setiap PPDB.

"PPDB Juli, masih lama, sabari lah. Setelah itu, Dulu waktu jadi Wakil Wali Kota saya juga menyelesaikan itu, mau zona atau apa kita dudukkan saja," ujarnya.

Sebelumnya, Rudi menyebutkan biaya di sekolah swasta terlalu mahal, sehingga menjadi alasan masyarakat

berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Dengan alasan itu, ia pun meminta swasta menurunkan biaya.

"Kalau ke sekolah negeri semua, sekolah swasta kan bisa tutup karena kekurangan murid," ujarnya waktu itu.

Sementara itu, Delaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan sempat pesimis terkait penurunan biaya sekolah swasta ini. Menurut dia, sekolah swasta memiliki aturan sendiri seiring pelaksanaan otonomi sekolah.

"Kami susah juga mau mak-sa. Sementara kami hanya bisa mengimbu," kata Hendri, Minggu (6/5) lalu.

Namun ia menilai harapan wali kota bukan tanpa alasan. Selain untuk kebaikan sekolah swasta itu sendiri, juga agar mendapat murid dan tetap bertahan.

Apalagi, permintaan menurunkan biaya muncul karena sekolah swasta telah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan insentif untuk guru sekolah swasta dari Pemko Batam.***

Napi Anak Didominasi Kasus Curanmor

Sambungan dari hal 9

Dia menyebutkan, rata-rata penghuni LKPA anak ini di-

pendidikan keagamaan. Di mana dengan pendidikan keagamaan, diharapkan karakter dan perilaku anak pelan pelan bisa berubah.

karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

"Saya tidak akan mau lagi ke sini (dipenjara di LKPA). Meski di sini kita bisa bermusik

Kenalkan Daging Kerbau lewat Pasar Murah

Sambungan dari hal 9

daging sapi, daging kerbau beku, ikan, gula, telur, susu, bawang, cabai, kentang, wortel, tepung, minyak goreng, mentega, sayur-sayuran, ketupat instant, serta penukaran uang baru dari Bank Indonesia (BI) atau perbankan.

Operasi pasar dan sekaligus pasar murah itu jadi momentum Bulog Batam untuk mengenalkan daging kerbau impor asal India kepada masyarakat. Daging kerbau impor ini dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) atau sekitar Rp 75 ribu hingga Rp 79 ribu per kilogram (kg).

"Nanti kami akan mengenalkan daging kerbau impor ini ke masyarakat. Kami jamin kualitas daging kerbau dari kami ini tak kalah dengan daging sapi yang ada di pasaran," ujar Ayu, Kasi Komersil Perum Bulog Sub Divre Batam, kemarin.

Dia mengatakan Bulog akan menerapkan harga khusus di saat pasar murah yang dimulai hari ini.

Sebenarnya daging kerbau ini bukan tak laku, hanya saja kan daging ini baru di

Batam dan memang kurang familiar. Makanya kami akan kenalkan daging kerbau ini ke masyarakat. Pastinya harganya lebih murah dibanding harga daging sapi beku," terangnya.

Daging kerbau sendiri, lanjut Ayu, didatangkan dari India oleh Bulog pusat. Tujuannya untuk menekan tingginya harga daging sapi jelang Ramadan dan Idul Fitri nanti.

"Selain itu, daging kerbau yang kami datangkan ini sifatnya juga sebagai pilihan atau alternatif ke masyarakat yang ingin mendapatkan daging dengan harga murah, sekaligus untuk meminimalisir monopoli harga daging nantinya di pasaran," ujarnya.

Selain mengenalkan daging kerbau melalui operasi pasar atau pasar murah dengan menggendeng TPID, Bulog juga mendistribusikan daging kerbau ke seluruh Rumah Pangan Kita (RPK) yang berjumlah 400 lebih tersebar se-Batam.

"Kami distribusikan ke RPK, agar nantinya daging kerbau ini lebih cepat dikenal masyarakat dan penyebarannya lebih merata. Istilahnya tak perlu jauh-jauh apabila ma-

sarakat menginginkan daging kerbau, tak perlu ke pasar, cukup datang ke RPK terdekat di setiap kelurahan. Ini juga untuk menekan permainan pedagang nakal yang biasanya menaikkan harga seandainya jelang Idul Fitri," jelasnya.

Apabila nanti ternyata daging kerbau sudah familiar di masyarakat, Bulog akan mendatangkan lagi daging kerbau serupa. "Intinya berapapun nanti yang diminta distributor, RPK atau pedagang terkait stok daging kerbau, kami siap untuk itu," terangnya.

Sebelumnya Bulog juga mengundang seluruh distributor, para pelaku RPK serta dinas terkait seperti Disperindag, Dinas Koperasi, Bea Cukai Batam, Satgas Pangan, serta Balai Karantina untuk mensosialisasikan daging kerbau di gudang Bulog, Batuampar.

Enam Ribu Paket untuk Batam Kota

Sementara itu, sebanyak enam ribu paket sembako murah dibagikan di Kecamatan Batam Kota, kemarin pagi. Pada tahap awal ini, dari enam kelurahan yang ada, hanya empat kelurahan yang akan menerima paket sembako

murah, yakni Seipanas, Teluk Tereng, Sukajadi, dan Taman Baloi.

Pembagian dipusatkan di dua lokasi. Pertama di depan Edukita untuk Kelurahan Seipanas dan Teluk Tereng. Sementara, Kelurahan Sukajadi dan Taman Baloi dipusatkan di Golden Gate Imperium. "Kelurahan Bellian dan Baloi Permai nanti di tahap kedua," ungkap Camat Batam Kota Muhammad Fairuz Batubara.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi mengatakan pembagian ini merupakan langkah yang dilakukan Pemko Batam guna membantu masyarakat tidak mampu jelang Ramadan.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Am-sakar Achmad turut menghadiri acara pembagian sembako tersebut. "Semoga ini bermanfaat," kata Wali Kota.

Paket sembako murah tersebut terdiri dari beras lima kilogram, minyak goreng kemasan dua liter dan gula kemasan satu kilogram. Penerima sembako cukup membayar Rp 50 ribu dari harga sebenarnya Rp 99.650 per satu pak-etnya. (gas/nji/iza)

Surat Pemko Tak Digubris BP Batam

Terkait Pembatalan Alokasi Lahan Kolam Batam Center

BATAM KOTA (BP) - Harapan Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar alokasi lahan kolam Batam Center dicabut hingga kini belum terealisasi. Pasalnya, surat permohonan Pemko ke Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga saat ini belum berbalas.

"Sampai sekarang kami belum dapat baik balasan surat maupun undangan rapat terkait ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie.

Ia mengatakan pada prinsipnya surat tersebut disampaikan sebagai itikad baik dan sesuai aturan karena yang memiliki kewenangan soal lahan adalah BP Batam.

"Makanya, konteksnya kami mengajukan permohonan selaku dinas yang membicarakan soal lingkungan," ucapnya.

Menurutnya, seharusnya surat permohonan itu terealisasi. Meski, itu semua tergantung BP Batam. Namun, besar harapan lokasi tersebut

tetap sebagai daerah resapan air dan taman seperti saat ini.

"Kalau mereka punya pandangan lain, bagaimana juga ya. Tapi kami minta lokasi itu fungsinya seperti sekarang," imbuhnya.

Terakhir, Direktur Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam Imam Bachroni mengaku hingga kini pihaknya masih mempelajari perihal persoa-

lan tersebut, termasuk kemungkinan pembatalan alokasi lahan ini.

"Kami sedang pelajari (opsi pembatalan) dan saya juga belum dapat laporan lengkapnya. Lokasi itu memang sudah (dialokasikan), nanti kami carikan solusinya," ucap Imam, beberapa waktu lalu.

Soal dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat alo-

kasi tersebut yakni banjir, Imam berpendapat justru sebaliknya. Karena, daerah sekitar kolam tersebut rendah, sehingga air akan mudah terbuang ke laut.

"Tak masalah (alokasi tidak dibatalkan, *red*) jika dari segi hidrologi, tapi jika memberi *public space* (hijau) mungkin ini penting. Tidak ada kaitannya dengan banjir," kata dia. (iza)



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

WARGA memancing ikan di Taman Kolam Batam Center, Minggu (22/4) lalu. Hingga saat ini, permintaan DLH Batam agar alokasi lahan taman kolam dibatalkan, belum ditanggapi BP Batam.

1.895 Permohonan Lahan Macet

Sambungan dari hal 1

Kedua, pemohon sudah bayar UWTO penuh, namun belum keluar SKEP, SPJ, dan PL. Ketiga, pemohon sudah bayar UWTO penuh dan mendapatkan PL, namun belum memperoleh Skep dan SPJ. Keempat, pihak yang baru mengajukan permohonan lahan saja.

"Ini semua harus kami tindaklanjuti," imbuhnya.

Kemudian, jika ditelusuri berdasarkan status lahannya, maka berkas pengajuan permohonan lahan dibagi lagi jadi lima kategori. Pertama, lahan yang berstatus jelas (*clear and clean*). Untuk lahan ini, si pemohon dipersilakan untuk melanjutkannya dengan pemaparan rencana bisnis di depan BP Batam. Kedua, lahan yang masuk dalam hutan lindung. Untuk lahan ini, BP tak bisa berbuat apa-apa.

"Kami hanya akan menyurati bahwa prosesnya tak bisa dilanjutkan. Lalu kami bersedia mengembalikan pembayaran UWTO-nya jika yang bersangkutan menyampaikan kepada kami," paparnya.

Ketiga, lahan yang masuk Daerah Penting dengan Cakupan Luas dan berdampak Strategis (DPCLS) atau hanya

sebagian saja.

"Untuk lahan ini, kami akan pecah PL untuk yang tak kena DPCLS, sedangkan untuk yang kena kami bikin PL juga atas nama pemilik lahan. Tapi sebelumnya harus menunggu pelepasan dari kementerian terkait. Dewan Kawasan (DK) yang akan bicara dengan kementerian tersebut," paparnya.

Keempat, lahan tumpang tindih. Persoalan ini memang agak berat, namun BP Batam akan mencoba berunding dengan pihak-pihak yang bersengketa soal lahan tersebut.

"Kita akan bicara dengan mereka, atau cari lahan yang lain lagi," ungkapnya.

Terakhir, lahan yang belum ada HPL-nya. Untuk persoalan ini, Dwi mengatakan BP yang akan mengurus HPL-nya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengusaha yang mengajukan permohonan lahan di atas tanah yang belum ada HPL-nya bisa mengecek langsung prosesnya di BPN karena BP Batam mencantumkan nomor dan tanggal surat rekomendasi BP ke BPN.

Sebelumnya, karena kepentingan ekonomi, BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam (OB) memberikan

kesempatan pada para pengusaha untuk mengurus HPL sendiri. Proses tersebut merupakan salah satu cara untuk mempercepat pembangunan. Namun dalam perjalanannya, proses tersebut tidak memberikan hasil yang baik.

Ada perkembangan di mana lahan lebih cepat dialokasikan, tapi HPL tak kunjung terbit. Prosesnya lama. Hal tersebut membuat ketidakpastian hukum di Batam. Sehingga, kerja sama percepatan penerbitan HPL dianggap dapat menyelesaikan masalah ini.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan menyambut positif penuntasan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Batam secara keseluruhan. "Ini sangat bagus bagi Batam ke depannya," ujar Achyar.

Dia mengapresiasi langkah BP Batam dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan HPL tersebut.

"Dua lembaga negara bisa duduk bareng untuk membicarakan masalah-masalah yang selama ini dianggap sebagai penghambat kemajuan Batam," kata Achyar. (leo)

Tera Ulang Alat Ukur di Seluruh Pasar

BATUAJI (BP) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desprindag) Kota Batam akan menertibkan alat ukur atau timbangan yang digunakan pedagang di pasar. Ini bertujuan untuk menghindari kecurangan yang mungkin saja dilakukan oknum pedagang demi keuntungan lebih besar menjelang dan selama Ramadan nanti.

Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi saat meninjau pasar basah SP Plaza Sagulung dan Pasar Aviari di Batuaji, Rabu (9/5) lalu menuturkan langkah penertiban yakni dengan melakukan tera ulang alat ukur atau timbangan yang su-

dah disediakan Desprindag di masing-masing pasar.

"Setiap pasar sudah kami sediakan alat ukur khusus. Alat ukur itu akan kami cek lagi (tera ulang agar sesuai dengan fungsinya). Nanti ada pedagang yang nakal atau bermain dengan alat ukur akan ketahuan jika pembeli ukur ulang di alat yang sudah kami sediakan ini," ujarnya.

Saat ini, alat ukur yang disediakan Desprindag sudah tersebar di seluruh pasar, namun karena sudah lama dipakai tentu ada yang rusak atau lari meteran pengukurnya. Seperti yang dijumpai Zarefriadi pada alat ukur yang ada di Pasar Aviari. Alat ukur terse-

but ternyata sudah tidak normal lagi, sebab meteran sudah lari sekitar setengah ons.

"Mungkin karena sudah terlalu lama. Ini akan segera kami atasi. Yang rusak diganti dan yang lari meterannya akan ditera ulang," tuturnya.

Selain tera ulang alat ukur yang disediakan Disperindag, Zarefriadi juga meminta anggotanya untuk mengawasi alat ukur yang digunakan oleh masing-masing pedagang. Jika tidak sesuai dengan alat ukur yang disediakan Disperindag tentu akan tindak tegas.

"Tadi saya sudah ngobrol dengan ibu-ibu yang belanja disini, memang ada masalah

itu (ketidaksesuaian alat ukur dari pedagang). Ini akan kami awasi secara serius. Anggota akan pantau rutin. Pedagang yang bermain akan kami data," tegasnya.

Kepada masyarakat Zarefriadi juga mengimbau agar selalu mencocokkan barang belanjanya dengan alat ukur

yang disediakan Disperindag. Jika ada selisi timbangan barang belanjanya, warga diminta melapor ke pihaknya.

"Masyarakat juga harus jeli dong. Kalau belanja manfaatkan alat yang sudah kami sediakan ini. Ada selisi (timbangan) laporkan. Akan kami tindak lanjuti," imbaunya. (eja)

Kenalkan Daging Kerbau le

Sambungan dari hal 9

daging sapi, daging kerbau beku, ikan, gula, telur, susu, bawang, cabai, kentang, wortel, tepung, minyak goreng, mentega, sayur-

Batam dan memang kurang familiar. Makanya kami akan kenalkan daging kerbau ini ke masyarakat. Pastinya harganya lebih murah dibanding harga daging sapi beku," terangnya.

Usulkan 19 Kegiatan untuk Hinterland

SEKUPANG (BP) - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam mengusulkan sedikitnya 19 kegiatan pada pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 mendatang. Seluruh kegiatan tersebut dipusatkan di *hinterland* atau pesisir.

Kepala DCKTR Batam Suhar mengungkapkan usulan tersebut didominasi pembangunan saluran air bersih untuk masyarakat di pesisir. Ia merinci, lima kegiatan di antaranya yakni pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM), 12 kegiatan pengelolaan air limbah domestik (SPALD), dan pembangunan dua instalasi pengolahan air limbah (IPAL). "Total pagu anggaran mencapai Rp 64,7 miliar," kata Suhar, Selasa (8/5) lalu.

Beberapa pulau yang diusulkan mendapatkan layanan dari DAK ini, yakni semua lokasi pembangunan, baik SPAM, SPALD, maupun IPAL, berada di pulau penyangga (*hinterland*). Seperti Pulau Labu, Boyan, Banun, Karas, Kasam, Kasu, Sembulang, Bulang Lintang, Jolo,

Temoyong, Lance, Cengkul, Buluh, Terong, dan Belakangpadang.

"Ini yang sudah kami usulkan. Untuk realisasinya tunggu dari pusat saja," sebutnya.

Ia menjelaskan saat ini capaian pelayanan air bersih untuk wilayah pesisir baru sekitar 20 persen. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengharapkan tahun 2020 mendatang naik menjadi 45 persen. "Untuk itu, kami mengusulkan daerah yang belum mendapatkan layanan air bersih bisa diwujudkan tahun depan," harapnya.

Suhar mengungkapkan saat ini pembangunan sistem pengolahan air bersih tengah dikerjakan. Tahun ini pihaknya mendapatkan bantuan Rp 21 miliar dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur air bagi masyarakat yang tinggal di pesisir. Tahun ini, beberapa wilayah yang dibangun infrastruktur, yakni SPALD di Kecamatan Belakangpadang dan Nongsa. (yui)

Biaya Sekolah Swasta Harus Turun

Wali Kota: Kami yang Putuskan, Pemerintah Harus Kuat

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN MEI 2018

JADWAL SAMSAT KELILING

NO	TANGGAL	LOKASI SAMSAT	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	02 MEI - 04 MEI 2018	NARITA MALL TOP 100 BANGKONG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH
2	07 MEI - 12 MEI 2018	KAPPA MALL TANAH BONTOL	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 MEI 2018 - HARI BURUH 09 MEI 2018 - HARI BURUH 10 MEI 2018 - HARI BURUH 11 MEI 2018 - HARI BURUH

JADWAL SAMSAT BERGERAK

NO	TANGGAL	LOKASI	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	02 MEI - 04 MEI 2018	KEC. SEKUPANG PUSAT MESA LUBANG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH
2	07 MEI - 12 MEI 2018	KEC. BONGKONG PUSAT MESA LUBANG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 MEI 2018 - HARI BURUH 09 MEI 2018 - HARI BURUH 10 MEI 2018 - HARI BURUH 11 MEI 2018 - HARI BURUH

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU

NO	TANGGAL	LOKASI	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	02 MEI - 04 MEI 2018	KELABANG PANGKAL KANTOR KEL. BANGKONG TUNGGAL LAMA	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH
2	07 MEI - 12 MEI 2018	PUSAT SAMPAH TUNGGAL KERTING PULAU GALANG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 MEI 2018 - HARI BURUH 09 MEI 2018 - HARI BURUH 10 MEI 2018 - HARI BURUH 11 MEI 2018 - HARI BURUH

ADIANSYAH, Batam Kota

Wali Kota Batam Muhammad Rudi kembali menegaskan biaya masuk sekolah swasta harus diturunkan. Rudi juga ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan beberapa waktu lalu bukan sekadar imbauan kepada sekolah swasta. "Kami yang memutuskan, pemerintah harus kuat dan bisa (turunkan iuran biaya di seko-

lah swasta, *real*)," ujarnya usai meributkan secara pembagiannya sembako murah di Golden Gate Imperium, Batam Kota, Kamis (5/10) pagi. Untuk itu, dalam waktu dekat, ia akan mendudukkan persoalan ini di internal Pemerintah Kota (Pemko) Batam, yakni mencari dasar hukum yang cocok untuk mengatur iuran atau biaya sekolah swasta. "Kami akan cari dasar hukumnya, pemerintah kan

boleh atur. Izinnya kan dari kita, pemerintah," tegasnya. Lalu apakah ada kebijakan tentang pengaturan agar anak-anak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta atau tidak di sekolah negeri? Rudi mengaku tidak bisa melakukan hal tersebut. Menurutnya setiap orang punya hak untuk memasukkan anaknya di sekolah manapun yang dianggap mumpuni.

"Tidak bisa dipaksakan, hak orang tua. Sekolah swasta baru boleh. Mereka (PNS) mau sekolah unggulan juga, kalau ada unggulan di negeri tak bisa kita larang, begitupun kalau mereka mau ke swasta," paparnya. Rudi menambahkan pekan depan atau tepatnya, Senin (14/5), pihaknya akan membahas teknis pelaksanaan



F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Muhammad Rudi

■ Baca BIAYA...Hal 13

7.000 e-KTP Belum Diambil Pemiliknya

SEKUPANG (BP) - Sekitar tujuh ribu lebih keping Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah selesai dicetak belum diambil oleh pemohon. Akibatnya, ribuan e-KTP tersebut masih menumpuk di ruang pelayanan Kantor Kecamatan Sekupang.

"Dari 10.932 e-KTP yang sudah jadi (dicetak), baru tiga ribu yang diambil pemiliknya," kata Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sekupang Delferi, Kamis (10/5).

Ia mengungkapkan proses pengambilan e-KTP memang masih dilakukan di kantor kecamatan, setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendistribusikan ke tingkat kecamatan dua minggu lalu.

"Awalnya ingin agar tidak tercecer, makanya kami pusatkan di kantor camat. Namun melihat rendahnya antusiasme warga untuk datang mengambil e-KTP mereka, maka kami akan serahkan ke kelurahan," sebutnya. Dikatakan Delferi, pihaknya sudah menyampaikan infor-

masi pengambilan e-KTP kepada masing-masing lurah hingga RT/RW. Nyatanya yang mengambil masih 30 persen dari total e-KTP yang sudah tercetak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, Disdukcapil Batam Teddy Nuh mengungkapkan masih rendahnya partisipasi warga untuk mengambil e-KTP di Kantor Kecamatan Sekupang mungkin disebabkan faktor kesibukkan.

"Banyak di antara mereka yang bekerja, jadi mungkin belum memiliki waktu mengambil e-KTP-nya," sebutnya.

Karena pertimbangan faktor tersebut, pihak kecamatan mengambil inisiatif dengan membuka pelayanan hingga Sabtu dan Minggu untuk mempercepat pendistribusian e-KTP ini.

"Jadi kami sangat apresiasi juga pihak kecamatan tetap buka (Sabtu dan Minggu) walau libur. Ini guna mempermudah warga yang libur bekerja mengambil e-KTP-nya," beber Teddy.

Saat ini, sambungnya, semua peralatan sudah dikembalikan ke kecamatan *mainland*. Semua permo-

honan warga untuk mendapatkan e-KTP juga telah dipersingkat menjadi lima hari kerja. "Semua inovasi

ini diharapkan mempermudah warga dalam melengkapi dokumen kependudukan mereka," tutupnya. (yul)

TERAS

Napi Anak Didominasi Kasus Curanmor

BATAM KOTA (BP) - Terdapat 65 orang anak menghuni Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II Kota Batam. Para nara pidana (napi) anak tersebut umumnya divonis penjara dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

"Sekarang masih tercatat 65 orang napi anak. Tapi tanggal 11 besok (hari ini, 11/5) jumlahnya sudah berkurang karena ada yang bebas," kata Kepala LKPA Kelas II Batam Novriadi, Kamis (10/5).



F. DALLI/HRASIAH/BATAM POS
Novriadi

■ Baca NAPI...Hal 13

PT. UNION JAYA SEJATI
SALES-RENTAL-SERVICE-SPAREPARTS
Generator sets, Air Compressor, Forklift, Diesel Welding Machines, Multi Operator Welding Machines, Babyroller, Bar Bender, Bar Cutter, Hammer Drill, Electro Motor, Dynamos, Radiator, Cooler, Air Hardware, Etc.

PERGUDANGAN KARTIKA BLOK B NO. 6 (BELAKANG RUSUN LANCANG KUNING) BATU AMPAR - BATAM. 422 498
0811 7710 992, 0811 7700 797

Good Service & Best Quality Make The Difference

E-mail : union_js@yahoo.co.id Website : www.ujs.co.id

Penerapan KEK Tak Otomatis Hilangkan Fasilitas FTZ

Presiden Ingin Hapus Dualisme Batam

ADIANSYAH, Batam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menghapus dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Presiden menilai,

penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam merupakan jawaban agar tumpang tindih kewenangan kedua lembaga ini berakhir.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota

Batam Wan Darussalam mengatakan hal ini merupakan arahan Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) tertanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 30 Maret 2017 lalu. Hal itu diungkapkan Wan menanggapi ramainya pro kontra

penerapan KEK belakangan ini.

"Ada tiga poin yang disampaikan Presiden pada dua kesempatan tersebut, yakni ubah FTZ Batam menjadi KEK, hapus dualisme pengelolaan di Batam, dan pe-

merintah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk Pembentukan KEK Batam," terang Wan Darussalam, Kamis (10/5).

Menurutnya, Jokowi melihat permasalahan di Batam sesungguhnya telah berakumulasi dan

cukup lama dan berkepanjangan. Oleh karena itu, pembenahannya harus substansial. Jokowi menilai penyelesaian dengan pola bisnis yang biasa tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah

unggul di kawasan regional ini.

"Penyelesaian secara tuntas belum pernah dilakukan. Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas," imbuhnya.

■ Baca PRESIDEN ...Hal 2

Presiden Ingin Hapus Dualisme Batam

Sambungan dari hal 1

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan hal yang serupa dengan Presiden. Tertuang dalam lima misi yang diemban Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dari Dewan Kawasan (DK) dan disampaikan pada acara Pelantikan Kepala BP Batam pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu di Jakarta.

Rinciannya adalah, pertama, BP Batam diminta segera menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan melakukan komunikasi positif dengan Pemprov Kepri, Pemko dan DPRD Batam, dan instansi terkait lainnya termasuk DK dan Tim Teknis, melakukan MoU dengan Pemko Batam meliputi pembagian wilayah dan kewenangan, termasuk perizinan serta mempercepat pengalihan aset pelayanan publik kepada Pemko Batam, termasuk pengalihan SDM BP Batam terkait.

Kedua, mempercepat transformasi FTZ ke KEK Batam. Dengan cara segera menyiapkan konsep KEK Batam (model ekonomi dan model bisnis yang tepat termasuk zona-zona KEK), mengumpulkan data-data bagi pengembangan KEK Batam, menyiapkan transformasi kelembagaan, mengusulkan kebijakan kepada DK, misalnya UWTO permukiman, skema penyelesaian lahan, tarif pelabuhan dan sebagainya, menyiapkan pemenuhan syarat pembentukan KEK, dan menyiapkan usulan dasar hukum pembentukan KEK Batam.

Ketiga, meningkatkan pelayanan dan investasi. Empat, meningkatkan kinerja organisasi BP Batam. Dan yang kelima, mendukung pembangunan Kota Batam yang nyaman, aman, asri dan lestari yakni dengan mengembangkan KEK Batam yang bersih, hijau, aman dan nyaman. Serta terkait penyelesaian masalah ruli.

Wan mengatakan, kinerja Batam sebagai *regional economic centre* sudah menurun disebabkan adanya faktor eksternal dan internal. Sehingga Batam kurang berdaya saing.

Faktor eksternal, yakni kebijakan FTZ sudah ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan regional Asia timur dan Asia tenggara. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antarnegara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan KEK atau SEZ (*Special Economic Zone*).

Sementara, tumpang tindih pengelolaan kewenangan dan wilayah FTZ Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta kompleksitas kelembagaan BP Batam merupakan faktor internal dan menjadi penyebab utama tidak kondusifnya pengelolaan FTZ Batam. "Hasil kajian Kementerian Keuangan Tahun 2015, data insentif fiskal (*potential lost*) FTZ periode 2010-2015 total Rp 112,86 triliun. Pengelolaan FTZ Batam lebih besar *potential loss* dan *cost*-nya dibandingkan dengan *benefit*," ungkapnya.

Dan, pengelolaan FTZ Batam tidak sesuai dengan semangat dan tujuan awal. Yaitu pelabuhan alih kapal yang belum berkembang, stagnan-

nya perkembangan industri manufaktur dan penyerapan tenaga kerja. Juga stagnannya jumlah kunjungan wisatawan asing, daya tarik Batam masih rendah bagi PMA dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia yang tidak memiliki insentif fiskal sebagai FTZ.

Bahkan, selama FTZ diberlakukan nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Batam lebih berstatus pasar daripada pusat penghasil barang dan jasa dengan nilai tambah yang menguntungkan kepentingan nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi Batam lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Batam bahkan menurun, tahun 2014 sebesar 7,34 persen, tahun 2015 sebesar 6,75 persen, tahun 2016 4,13 persen, dan tahun 2017 pada semester satu sebesar 1,52 persen. "Tingkat pertumbuhan investasi rendah dan investor mengalihkan usaha ke luar Batam," katanya.

Selain itu, selama FTZ berlangsung pertumbuhan penduduk di Kota Batam sangat tinggi. FTZ juga memicu urbanisasi tenaga kerja tidak produktif. Selebihnya, pemberlakuan FTZ dinilai meningkatkan kasus penyelundupan ke kawasan pabean di dalam negeri.

Terkait transformasi FTZ ke KEK dimungkinkan berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK. Selain dapat menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan, KEK juga dinilai akan mengakhiri tumpang tindih perizinan dan tumpang tindih wilayah kerja antara BP Batam dengan

Pemko Batam.

Juga, memudahkan pelaksanaan pembangunan dalam hal penyediaan lahan untuk fasilitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Batam, memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai kawasan destinasi investasi di Indonesia. "KEK memiliki berbagai fasilitas dan kemudahan yang sama atau mendekati dengan fasilitas kawasan sejenis di negara lain yang meliputi pajak, kepabeanan, pertanahan, imigrasi, perizinan," ucap dia.

Terkait zona KEK, Wan menyebutkan, nantinya wilayah KEK Batam meliputi zona pola ruang RTRW dengan peruntukan industri, pariwisata, dan kepelabuhanan. Sebagian besar kawasan industri, pariwisata, dan pelabuhan yang telah eksisting saat ini, termasuk dalam peta rencana KEK Batam.

Wan juga menegaskan, penerapan KEK Batam tidak otomatis menghapus fasilitas FTZ Batam. Sehingga, kata Wan, Untuk pelaku usaha dan masyarakat yang berada di luar KEK, masih tetap diberikan fasilitas dan kemudahan (insentif) sama dengan fasilitas dan kemudahan (insentif) FTZ yang telah diterima selama ini.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga menilai kehadiran KEK Batan merupakan jawaban agar persoalan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa diselesaikan. "Ketika menjadi KEK, wilayah kerja kami dan BP Batam akan *clear*," kata Amsakar.***

1.895

Permohonan Lahan Macet

BP Batam Kembalikan UWTO Lahan di Hutan Lindung

BATAM (BP) - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menyelesaikan 1.895 berkas pengajuan lahan sepanjang 2015 hingga 2016 yang masih mandek hingga saat ini. Targetnya, akhir tahun ini selesai agar pengusaha bisa segera membangun lahan tersebut.

"Dulu sempat terhenti, makanya mau kami proses segera biar segera dibangun," ujar Deputy III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Kamis (10/5).

Proses pengajuan lahan memang sempat terhenti karena kebijakan pimpinan sebelumnya yang ingin beres-beres internal di kantor lahan. Tujuannya adalah melakukan migrasi pelayanan dari manual ke digital. Sehingga berimbas juga kepada berkas-berkas pengajuan lahan tak diproses.

Dwi kemudian menjelaskan jenis-jenis pengajuan permohonan lahan berdasarkan pemrosesan oleh BP Batam terdiri dari empat kategori.

Pertama, pemohon sudah bayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebesar 10 persen, tapi belum memperoleh Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (Skep), dan Penetapan Lahan (PL).